



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan nasional di segala bidang, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya melakukan pembangunan nasional pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang tidak sedikit tersebut pemerintah dituntut menggali sumber-sumber pendapatan negara yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, serta pajak lainnya. Adapun penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar.

Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, dan pendapatan Badan Layana Umum (BLU). Penerimaan SDA terdiri dari Migas dan Non Migas. Migas terdiri dari minyak bumi dan gas alam, sedangkan Non Migas terdiri dari pertambangan umum, kehutanan, perikanan,

serta pertambangan panas bumi. Dari semua sumber pendapatan negara tersebut, penerimaan pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan negara yang berkontribusi cukup besar. Terlihat dalam Tabel 1.1 tentang Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak Periode 1 Januari S.D 31 Januari 2014.

Tabel 1.1
Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2013
Direktorat Jenderal Pajak Periode 1 Januari S.D 31 Januari 2014

No	Jenis Pajak	Realisasi 2012	APBN P 2013	Target 0% 2012-2013	Realisasi s.d. 31 Desember			Penc. 2012 (%)	Penc. 2013 (%)
					2012	2013	Perl. (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(10)-7/1	
A	PPh Non Migas	381,203.98	464,481.36	21.86	381,203.98	413,987.97	3.68	86.62	69.11
	1. PPh Ps 21	79,559.16	101,915.00	20.10	79,559.16	89,387.55	-12.99	86.20	88.21
	2. PPh Pa 22	5,405.81	6,600.00	20.11	5,405.81	5,766.39	23.12	66.41	102.51
	3. PPh Ps 22 Impor	31,809.47	42,704.15	35.10	31,809.47	38,329.63	14.93	82.78	85.07
	4. PPh Ps 23	20,290.26	24,530.70	20.90	20,290.26	22,140.03	9.12	71.23	90.25
	5. PPh Pa 25/25 Or	3,753.25	6,443.34	11.22	3,753.25	4,378.79	15.36	67.01	67.95
	6. PPh Ps 25/25 Badan	152,624.09	100,110.52	10.01	152,624.09	151,906.61	(0.47)	79.05	84.34
	7. PPh Pa 26	27,458.53	32,779.51	10.36	27,458.53	31,082.96	13.20	92.16	94.82
	8. PPh Final	60,369.81	69,319.09	14.87	60,369.81	71,367.11	18.20	108.04	102.90
	9. PPh Non Migas Lainnya	12.70	42.50	30.40	12.70	17.79	15.59	70.16	88.81
B	PPN dan PPhBM	337,413.37	423,708.25	25.56	337,413.37	383,423.94	13.64	100.40	90.49
	1. PPh Dalam Negeri	191,769.44	245,433.51	27.06	191,769.44	225,484.08	17.58	97.87	91.87
	2. PPh Impor	126,506.64	166,814.57	23.86	126,506.64	138,983.13	9.78	103.60	88.61
	3. PPhBM Dalam Negeri	10,428.41	11,440.75	26.89	10,428.41	11,542.09	10.88	91.35	85.87
	4. PPhBM Impor	8,422.80	7,455.03	(11.46)	8,422.80	7,281.23	(13.55)	136.50	97.65
	5. PPhBM Lainnya	186.08	633.40	186.66	186.08	133.11	(28.47)	43.66	24.95
C	PEB	28,966.11	27,313.30	(5.60)	28,966.11	25,296.84	(12.67)	97.67	92.61
	1. PBB Pedesaan	1,132.39	808.56	(28.80)	1,132.39	748.96	(33.88)	155.43	92.63
	2. PBB Perkotaan	6,103.03	1,510.00	(75.12)	6,103.03	1,304.09	(77.65)	110.57	09.02
	3. PBB Perkebunan	1,106.33	1,616.96	46.78	1,106.33	1,319.27	19.26	87.66	80.15
	4. PBB Kebudajaan	254.52	177.05	40.45	254.52	292.50	14.95	87.40	77.43
	5. PBB Pertambangan Non Migas	565.03	734.86	30.06	565.03	631.25	11.72	107.24	85.93
	6. PBB Pertambangan Migas	19,804.50	22,257.90	12.39	19,804.50	20,940.70	5.74	91.13	94.03
D	Pajak Lainnya	4,210.10	6,401.98	26.30	4,210.10	1,933.36	17.17	71.76	81.32
E	PPh Migas	83,460.55	74,277.98	(11.00)	83,460.55	83,747.48	6.33	122.89	119.43
Total A + B + C + D + E		835,255.12	955,213.90	15.15	835,255.12	910,289.57	9.70	94.58	92.87

Sumber : Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan DJPb

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan PPh Migas dan Non Migas tahun 2012 sejumlah Rp 464.664,93 miliar dan penerimaan PPh Migas dan Non Migas tahun 2013 sejumlah Rp 502.645,45 miliar. Data tersebut menunjukkan peningkatan penerimaan PPh Migas dan Non Migas tahun 2013 sebesar 8,17% dari tahun

sebelumnya. Berdasarkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut atas penerimaan pajak penghasilan, agar dapat diperoleh informasi sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi *budgetair* pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri.

Situs www.pajak.go.id menyatakan “Data World Bank menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, minimal 25%-nya, atau sekitar 61,5 juta jiwa, dikatakan telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Namun kenyataannya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 23,22 juta”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui, masih terdapat kurang lebih 38 juta penduduk yang belum mempunyai NPWP. Semakin banyak Wajib Pajak (WP) terdaftar semakin banyak Wajib Pajak berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga semakin banyak penerimaan pajak penghasilan diterima. Hasil penelitian yang dilakukan Fitriani & Saputra (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan Ekstensifikasi Pajak. Dalam surat edaran DJP Nomor SE-06/PJ.9/2001, dijelaskan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bentuk Ekstensifikasi Pajak yang dilakukan DJP diantaranya yaitu pembentukan PP 46 atas

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PMK No.107/PMK.011/2013, pemberian NPWP kepada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP serta wacana pemajakan transaksi atas jual beli *online*. Dengan semakin efektif Ekstensifikasi Pajak yang dilakukan akan semakin banyak Wajib Pajak (WP) terdaftar maka semakin banyak WP yang berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga semakin banyak pula penerimaan pajak penghasilan diterima. Namun hasil penelitian Fitriani & Saputra (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Ekstensifikasi Pajak terdaftar terhadap jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dengan semakin banyak Wajib Pajak terdaftar akan semakin besar pula kemungkinan kelalaian wajib pajak dalam kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kelalaian pemenuhan kewajiban pajak dapat menimbulkan utang pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai upaya pengawasan terhadap kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan penagihan atas hutang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajak 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dimaksudkan untuk menegur wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Semakin Efektif Penerbitan Surat Teguran akan semakin banyak banyak wajib pajak yang melunasi utang pajak yang akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Semakin peningkatan pencairan tunggakan pajak, maka jumlah penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat. Namun hasil penelitian Fauziah (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Surat Teguran diterbitkan terhadap jumlah penerimaan PPh.

Bila Wajib pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Semakin Efektif Penerbitan Surat Paksa akan semakin banyak wajib pajak membayar hutang pajak dan semakin banyak pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak pencairan tunggakan pajaknya maka jumlah

penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat. Namun penelitian Fauziah (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Surat Paksa diterbitkan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis melakukan penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009). Dalam penelitian ini, peneliti membedakan beberapa hal dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009) yaitu:

1. Variabel Dependen

Mengganti variabel dependen jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan (termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013).

2. Variabel Independen

Menambahkan variabel independen yaitu Efektifitas Penerbitan Surat Teguran dan Efektifitas Penerbitan Surat Paksa yang mengacu pada penelitian Nidar, Pengemanan dan Sabijono (2014). Peneliti tidak menguji variabel independen SSP diterima dan rasio pencairan tunggakan pajak karena tidak tersedianya data.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tigaraksa. Sedangkan, objek penelitian sebelumnya adalah Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

4. Tahun Penelitian

Menggunakan periode tahun 2011-2013 sebagai periode tahun penelitian. Sedangkan, pada penelitian sebelumnya digunakan periode tahun 2009-2013 sebagai periode tahun penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh pribadi tahun 2011 sampai tahun 2013. Ketertarikan tersebut diwujudkan dalam penelitian ini dengan judul **”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2011 Sampai 2013 ”**.

1.2. Batasan Masalah

Untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diuraikan dan agar pembahasan penelitian ini dapat lebih terperinci, peneliti memberikan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada satu variabel dependen jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang memiliki populasi jumlah penerimaan PPh di Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut cakupan objek penelitian dalam penelitian ini dibatasi dengan menggunakan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Tigaraksa.

2. Faktor-Faktor Diteliti

Pengambilan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak yang diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, dan Efektifitas Penerbitan Surat Paksa.

3. Periode Penelitian

Periode pengumpulan data yang diteliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan periode 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2013.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti sebagai acuan hal-hal apasaja yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Apakah Ekstensifikasi Pajak yang diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar, berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah Efektifitas Penerbitan Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
4. Apakah Efektifitas Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

5. Apakah terdapat pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, Efektifitas Penerbitan Surat Paksa secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan penjawab dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk menguji pengaruh Ekstensifikasi Pajak yang diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Untuk menguji pengaruh Efektifitas Penerbitan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan.
4. Untuk menguji pengaruh Efektifitas Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan.
5. Untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, Efektifitas Penerbitan Surat Paksa secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya, diantaranya yaitu:

1. Bagi Fiskus

Sebagai masukan dan bahan evaluasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi atas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa.

2. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa.

3. Bagi Peneliti-peneliti Berikutnya

Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2011 sampai 2013.

4. Peneliti

Mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2011 sampai 2013.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab II : TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan mengenai definisi-definisi, pandangan para tokoh, dan pendapat pakar dalam bidang perpajakan, uraian faktor-faktor penerimaan pajak, serta hasil dari penelitian sebelumnya terhadap faktor-faktor penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Bab III : METODE PENELITIAN

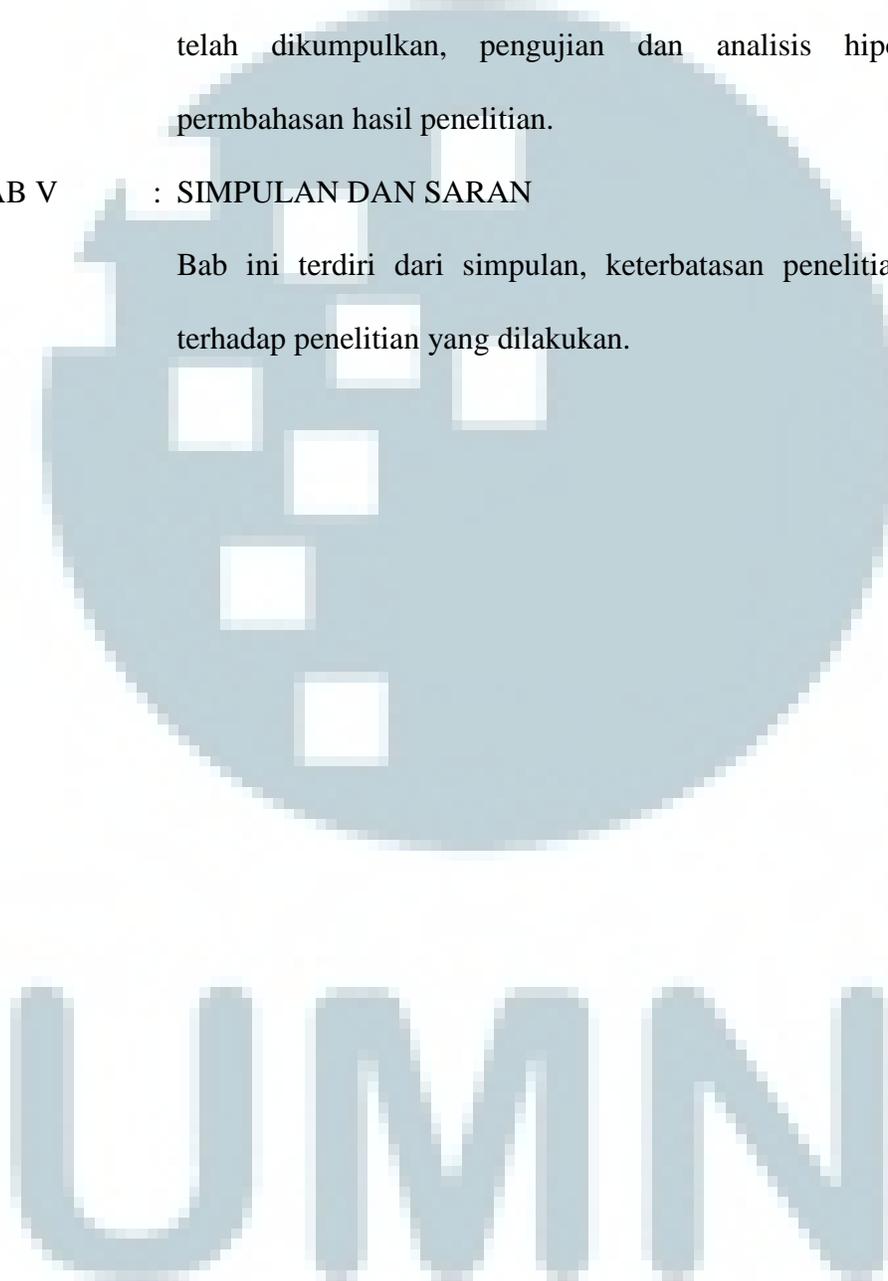
Bab ini menjelaskan tentang uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk melengkapi syarat dalam melakukan metode penelitian yang meliputi variable penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.



UMN